



WAJAH BURAM PEMBERANTASAN KORUPSI RI

RANKING INDEKS PERSEPSI KORUPSI ANJLOK DI BAWAH TIMOR LESTE

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index Indonesia 2023 stagnan dengan skor 34. Namun dari sisi ranking turun 5 peringkat, yaitu berada di urutan ke 115 dari 180 negara. Merujuk data yang dikeluarkan Transparency International, posisi itu menempatkan Indonesia setara dengan lima negara lainnya, yakni: Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Sementara dibanding negara kawasan ASEAN, Indonesia tertinggal dari Malaysia, Vietnam bahkan berada di bawah Timor Leste. Menurut para pegiat anti-korupsi, selain rangkaian kontroversi konflik kepentingan, skor IPK ini bak menjadi nilai akhir pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya selama 10 tahun, terbukti strategi dan agenda Jokowi terkait pemberantasan rasuah tidak berhasil. Sorotan makin tajam, karena di detik-detik terakhir masa kepemimpinannya para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah terjerat kasus etik hingga pidana pemerasan.

Baca di hal 11....

PERINGKAT 5 PALING ATAS DALAM IPK:

1. Denmark	90
2. Finlandia	87

3. Selandia Baru	85
4. Norwegia	84
5. Singapura	83

PERINGKAT 5 PALING BAWAH DALAM IPK:

180. Somalia	11
179. Venezuela	13

178. Sudan Selatan	13
177. Suriah	13
176. Yaman	16

ASEAN CPI 2023

Singapura	83 (83)
Malaysia	50 (47)
Timor Leste	43 (42)
Vietnam	41 (42)
Thailand	35 (36)
Indonesia*	34 (34)
Philippines	34 (33)
Laos	28 (31)
Cambodia	22 (24)
Myanmar	20 (23)

KET

(.....) CPI 2022

* Peringkat CPI 2022: 110, pada tahun
2023 peringkat CPI : 115

**Government (Hal.2)
Eks Wamenkumham
Eddy Hiariej Menang
Praperadilan,
Status Tersangka
KPK Gugur**



Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Menang Praperadilan Status Tersangka KPK Gugur



Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Dengan putusan itu, status tersangka yang disematkan kepada Eddy Hiariej menjadi batal.

"Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hakim Estiono membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (30/1/2024).

Dalam permohonannya, Eddy Hiariej menyebutkan KPK sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Eddy meminta status tersebut dibatalkan. Ia menilai perbuatan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. Sebab, tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum sehingga seharusnya dinyatakan batal.

Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut. Hakim menilai penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana."Maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum," kata hakim.

Dalam kasusnya, Eddy Hiariej bersama dua anak buahnya diduga bersama-sama menerima suap Rp 8 miliar. Pemberian suap ini diduga terkait pengurusan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan janji pemberian SP3 kasus di Bareskrim.

Meski demikian, hakim menolak empat dari sembilan petitem yang diajukan Eddy Hiariej. "Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan angka 5, 6, 7, 8 karena itu bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan, maka sepatutnya dinyatakan ditolak," kata hakim ketua Estiono.

KPK Pelajari Putusan

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango pun buka suara. "Kita akan pelajari dahulu putusan hakim praperadilannya," kata Nawawi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Nawawi mengaku sudah memerintahkan jajaran Biro Hukum KPK untuk menjelaskan kepada publik terkait kekalahan di sidang praperadilan Eddy. "Esok sudah saya minta Ka Biro Hukum memaparkannya," ujarnya.

Senada, Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan lembaga yang menghormati putusan hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menyidangkan perkara itu. "Kita semua terhadap setiap putusan Majelis Hakim itu menghormatinya, termasuk dalam sidang praperadilan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham EOSH," kata Ali kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Ali menyampaikan KPK belum menerima risalah lengkap putusan sidang itu. Tapi putusan ini sebenarnya menggugurkan penetapan tersangka terhadap Prof Eddy. "KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu," ujar Ali.

Ali juga menyebut KPK bakal mempelajari putusan itu setelah mendapat salinannya. Sehingga nantinya KPK dapat memutuskan langkah hukum secara resmi. "Untuk kami pelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya," ujar Ali.

Merespons hal tersebut, Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, putusan dikabulkannya gugatan Eddy Hiariej tentu telah melalui pertimbangan majelis hakim. "Namanya urusan pengadilan, pengadilan sudah menetapkan demikian tentu pengadilan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tentang hal itu," kata Yasonna saat Syukuran Hari Bhakti ke-74 Imigrasi, Selasa (30/1/2024).

Dalam putusan gugatan, hakim menilai penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK tidak sah. Yasonna

menyerahkan kepada komisi antirasuah untuk mengambil tindakan apa ke depannya. "Kita menghormati saja keputusan pengadilan, terserah nanti bagaimana tindak lanjutnya dari KPK, secara hukum memang begitulah pengadilan memutuskan," ujarnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

9 PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN EDDY HIARIEJ

5 permintaan yang dikabulkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari pemohon Edward Omar Sharif Hiariej untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan pemohon, Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat
5. (Petitem nomor 9) Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

4 permintaan yang ditolak hakim:

1. Petitem nomor 5) Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan pemohon Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka
2. (Petitem nomor 6) Menyatakan seluruh rangkaian pemblokiran rekening dan larangan berpergian ke luar negeri, oleh termohon terhadap diri pemohon atau keluarga pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik./147/DIK.00/01/11/2023 untuk pemohon Edward Omar Sharif Hiariej dinyatakan tidak sah dan memerintahkan ka kepada termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan
3. (Petitem nomor 7) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon
4. (Petitem nomor 8) Memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon.

Diduga Unggah Pasal Palsu, Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu

JAKARTA-Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) melaporkan Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden berkampanye. Tom Lembong menyerahkan hal itu kepada tim hukum AMIN.

"Saya kira ini sebaiknya dijawab oleh tim hukum, ya kan. Apa, karena saya subjeknya, jadi secara profesional biasanya subjek tidak mengomentari dirinya sendiri," ujar Tom Lembong usai acara 'Perluncuran Corruption Perceptions Index 2023' di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Ia meminta tim hukum untuk mendalami perkara yang dimaksud. Ia menghormati proses hukum yang berjalan. "Jadi nanti tolong kita minta kepada tim hukum, apakah ada perkara atau ada substansi dan tentunya kami selalu akan menghormati proses hukum yang valid dan transparan dan sesuai peraturan yang berlaku ya," ujarnya.

Sebelumnya tim Advokat Lisan membenarkan laporan itu. "Betul (melaporkan Tom Lembong ke Bawaslu)." Tanda bukti penyampaian laporan itu bernomor: 053/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tertanggal Senin, 29 Januari 2024.

Laporan ini berdasar unggahan Tom Lembong di akun Instagram-nya pada Jumat (26/1/2024) yang menampilkan sebuah gambar 'Pasal 299 ayat 1'. Sebagaimana pasal itu dikutip, Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/..."

Menurut Hendarsam, Pasal 299 ayat 1 yang diunggah Tom Lembong itu tidak diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut dinilai palsu, karena belum sah dan masih dimintakan di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai bagian dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN, unggahan Tom Lembong tersebut dinilai menghasut sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Bahwa patut diduga Thomas Trikasih Lembong melakukan upaya menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat agar merespon secara negatif ungkapan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyinggung bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye," tulis



Warga menunjukkan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (28/1/2024). (ant.dok)

Hendarsam dalam laporannya.

Tom Lembong diduga melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal larangan kampanye yang bersifat menghasut atau mengadu domba perorangan dan masyarakat.

Hendarsam pun meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut. "Atas dasar temuan tersebut, kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan segera agar menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," imbuhnya.

Terpisah, Bawaslu membenarkan adanya laporan terhadap Co Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong soal unggah pasal palsu di media sosialnya.

"Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Peraturan Bawaslu nomor 7, apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil tidak," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi saat dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Kesulitan Telusuri Beras Berstiker Paslon

Di sisi lain, Bawaslu belum menemukan fakta perihal pembagian bantuan sosial bertanda stiker pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan yang perlu ditelusuri adalah foto yang tersebar di media sosial. Terutama lokasi penyaluran bansos seperti tertera dalam foto itu.

"Kan itu perlu telusuri. Satu, bentuknya foto, terus di mana dan bagaimana kan belum jelas," kata dia,

di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, kronologi sumber foto itu didapat dari siapa. "Apakah kemudian foto itu didapat A dan B atau kemudian benarkan foto demikian? Atau bagaimana kan kita enggak ngerti juga," kata dia.

Selanjutnya, Rahmat mengakui mencari tahu foto yang memuat stiker Prabowo-Gibran di bansos itu sulit. Dia menyatakan sedang mencari tahu informasi kebenaran informasi tersebut Kementerian Sosial dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Adapun pengunggah foto itu baru dipanggil ketika ada temuan pelanggaran dalam penyebaran foto tersebut. "Kemungkinan dipanggil kalau sudah ada temuannya," ujar dia. (wid,rls,ist/dya)

DUGAAN PASAL PALSU YANG DIUNGGAH OLEH TOM LEMBONG

- Unggahan Tom Lembong di akun Instagram-nya pada Jumat (26/1/2024) yang menampilkan sebuah gambar 'Pasal 299 ayat 1'. Sebagaimana pasal itu dikutip sebagai berikut:
- Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/...
- *Pasal tersebut dinilai palsu, karena belum sah dan masih dimintakan di Mahkamah Konstitusi.

ADAPUN BUNYI PASAL 299 AYAT 1 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU:

(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

- calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
- anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
- pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

JADWAL KAMPANYE AKBAR PILPRES 2024

1	2	3
		
ANIES BASWEDAN - MUHAIMIN ISKANDAR	PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING	GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
8 FEBRUARI 2024 JAWA BARAT	8 FEBRUARI 2024 JAWA TENGAH	8 FEBRUARI 2024 JAWA TIMUR
9 FEBRUARI 2024 JAWA TIMUR	9 FEBRUARI 2024 JAWA TIMUR	9 FEBRUARI 2024 DKI JAKARTA
10 FEBRUARI 2024 DKI JAKARTA	10 FEBRUARI 2024 DKI JAKARTA	10 FEBRUARI 2024 JAWA TENGAH

Sebanyak 14 Orang Panwascam di Mojokerto Mengundurkan Diri

MOJOKERTO – Setelah beberapa waktu dihebohkan dengan banyaknya anggota KPPS yang mengundurkan diri, kali ini dikabarkan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kota Mojokerto ramai-ramai mengundurkan diri.

Dari kabar yang didapat, setidaknya ada 14 orang yang mengundurkan diri mulai dari anggota Panwascam Kranggan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), hingga Kesekretariatan Panwascam Kranggan non ASN.

Komisioner Panwascam Kranggan, Soetomo Cahyadi, dikutip dari beritajatim mengatakan jika hubungan antara Panwascam Kranggan dan Bawaslu Kota Mojokerto kurang harmonis. “Mungkin karena banyaknya perbedaan antara kebijakan Kota (Bawaslu Kota Mojokerto) dengan Panwascam Kranggan yang kami anggap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, Bawaslu Kota Mojokerto kurang memberikan support pengawasan kepada Panwascam Kranggan. Ia memberikan contoh dalam pengadaan elektronik. Soetomo menilai, jika Bawaslu Kota Mojokerto memberikan pengadaan elektronik kurang untuk memenuhi

kebutuhan di Kesekretariatan Panwascam Kranggan.

“Ketua kami, Panwascam Kranggan sebetulnya sudah diajak rapat sebelum kami mengundurkan diri. Namun Ketua Panwascam Kranggan tidak diberikan ruang untuk memberikan usulan, akhirnya Ketua Panwascam Kranggan memberikan opsi, memberikan persetujuan setelah berkoordinasi setelah rapat internal,” katanya.

Menurutnya, pengunduran diri anggota Panwascam Kranggan dilakukan secara pribadi dan tidak melibatkan pihak manapun. Namun karena dinamika yang terjadi di Panwascam Kranggan sehingga anggota PKD dan Kesekretariatan Panwascam Kranggan turut mengundurkan diri.

“PKD dan Kesekretariatan terutama yang bukan PNS, mereka memilih mundur karena alasan pribadi, alasan-alasan yang objektif bagi mereka. Awal, kami hanya Panwascam 3 orang per tanggal 26 Januari. Secara tertulis kami mengajukan ke Bawaslu Kota Mojokerto. Setelah itu diikuti oleh Kesekretariatan yang bukan ASN,” ujarnya.

Jumlah Kesekretariatan Panwascam Kranggan bukan ASN yang mengundurkan diri ada lima orang.

Yakni tiga staf teknis dan dua staf pendukung. Pengunduran diri tak berhenti disitu namun juga disusul enam orang Panwaslu Kelurahan. Di Kecamatan Kranggan ada enam kelurahan, masing-masing kelurahan ada satu Panwaslu Kelurahan.

“Total ada 14 orang di Panwascam Kranggan yang mengundurkan diri. Tidak ada harmonis saja sebetulnya tapi direspon oleh Kota (Bawaslu Kota Mojokerto) terlalu berlebihan. Khususnya terkait anggaran karena kami untuk melakukan pengawasan itu butuh banyak logistik, dukungan dari anggaran. Kira-kira seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya pengunduran diri sebanyak 14 anggota Panwascam Kranggan tersebut sebelumnya sudah disampaikan melalui rapat namun tidak direspon oleh Bawaslu Kota Mojokerto. Sehingga pengunduran diri hingga 14 orang tersebut dilakukan melalui surat tertulis yang ditujukan ke Bawaslu Kota Mojokerto.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota



Kantor Panwascam Kranggan di Perum Griya Permata Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto tampak sepi. [Foto : ist]

Mojokerto, Dian Pratmawati mengaku belum bisa memberikan komentar terkait pengunduran diri 14 anggota Panwascam Kranggan tersebut. “Ngapunten belum bisa kasih komentar, masih dibicarakan internal dulu. Nek wis (kalau sudah) terang permasalahan nanti pasti tak konfirmasi kok,” pungkasnya. (lut/dya)

Oknum Guru SMKN di Kota Madiun Paksa Murid Beli Produk Sekolah

MADIUN – Sejumlah wali murid SMKN 3 Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim) mengeluhkan adanya oknum guru yang memaksakan para siswa membeli sejumlah barang hasil produksi internal sekolah. Bahkan diduga ada ancaman tak diberi nilai hingga rapor kosong bagi yang menolaknya.

Salah seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya disembunyikan mengaku guru tersebut mewajibkan anaknya membeli sejumlah barang dengan nominal mulai Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. Jenis barang yang diwajibkan untuk dibeli berupa produk cairan pembersih lantai dan sabun.

Dikatakannya, oknum guru tersebut juga mengancam tidak akan memberikan nilai kepada siswa-siswi yang belum melunasi uang pembayaran produk. Diketahui, setelah dicek ternyata produk-produk itu belum terdaftar sebagai merek dagang yang sah di situs Kementerian Perdagangan.



SMKN Negeri 3 di Kota Madiun diduga paksa murid beli produk sekolah.

“Kalau tidak mau beli nanti rapornya tidak dikasih nilai, tidak ditandatangani sama guru itu,” ujar wali murid tersebut, Selasa (30/1/2024).

Dirinya mengaku keberatan dengan yang dilakukan oknum guru itu karena terkesan arogan. Apalagi, kondisi ekonomi sedang lesu, masih harus dibebani membayar sejumlah

uang. Bahkan produk yang dibeli dinilai tidak ada korelasinya dengan kelas dan jurusan yang diambil anaknya.

“Kalau anak saya sekolahnya pemasaran mungkin bisa saya maklumi, lha ini kan sekolah jurusan Kimia, masak disuruh beli barang seperti itu? Ya menurut saya aneh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Kota Madiun Sunardi Achmad saat dikonfirmasi melalui pesan singkat meminta agar menemui salah satu guru bernama Titik Yuliani. “Kita memang meminta siswa untuk memasarkan produk yang ada, kalau memang siswa tidak punya uang bisa kok bon (utang) barang dahulu,” jawab Titik saat dikonfirmasi di sekolah.

Namun, saat ditanya terkait oknum guru yang mengancam tidak akan memberikan nilai kepada siswa-siswi yang belum memasarkan barang atau membeli produk, Titik meminta itu ditanyakan kepada kepala sekolah. “Itu bukan wewenang saya, biar nanti pak kepala sekolah saja yang jawab,” tutupnya. (Wit/dya)

Gubernur Jatim Lantik Pj Wali Kota Probolinggo dan Pj Bupati Sampang

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Nurkholis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo dan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang di Gedung Negara Graha, Selasa (30/1/2024) malam.

Nurkholis resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3 76 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur menggantikan Hadi Zainal Abidin yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Sedangkan pelantikan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3/0501/OTDA tertanggal 7 Januari 2024, Rudi Arifiyanto ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang menggantikan Slamet Junaidi yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Nurkholis dan Rudi Arifiyanto akan menjabat sebagai Pj Wali Kota Probolinggo dan Pj Bupati Sampang hingga terpilihnya Wali Kota dan Bupati definitif mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah memberikan pesan khusus terkait keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang sudah baik di Kota Probolinggo diharapkan bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Selain itu yang patut diapresiasi, UMKM di Probolinggo mengalami kesuksesan yang luar biasa dengan dikenal lebih luas, pemasarannya sangat bagus, dan kreativitas yang sudah dibangun oleh Pak Walikota 2019-2024 juga sudah luar biasa," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu efektivitas ini saya harap bisa diteruskan oleh Pak Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis ke depan," lanjutnya.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berpesan tentang empat hal yang menjadi amanah dari



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Nurkholis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo dan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang di Gedung Negara Graha, Selasa (30/1/2024) malam.

Presiden bagi setiap kepala daerah terkait penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak.

Berikutnya adalah meningkatkan investasi. Saat ini Jatim pun capaian realisasi investasinya sudah sangat signifikan dan melampaui rata-rata nasional baik PMA maupun PMDN.

Pun begitu dengan maksimalisasi digital IT. Dikatakan Khofifah bahwa SPBE Jawa Timur telah menorehkan prestasi dengan menjadi yang terbaik diantara seluruh provinsi di Indonesia.

"Dan yang keempat adalah melaksanakan program aktual dari Presiden. Sesuai arahan presiden kebetulan yang dijadikan contoh adalah e-katalog dari Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ternyata e-katalog PBJ dari semua provinsi di Indonesia terbanyak adalah dari provinsi Jawa Timur," tegasnya.

Sedangkan untuk Pj Bupati Sampang, Gubernur Khofifah berpesan supaya sesegera mungkin meneruskan program kerja kepala daerah sebelumnya. "Pak Pj Bupati Sampang, PR bapak masih banyak yang perlu diselesaikan, mudah-mudahan segera beradaptasi pak Rudi, dan selamat menjalankan tugas,"

kata Khofifah.

Menurutnya, perlu akselerasi program kerja dan sinergi berbagai institusi selama menjalankan tugas di Kabupaten Sampang. Hal ini penting agar percepatan penurunan stunting terus dijalankan. "Perlu inovasi yang bisa memberikan percepatan seperti suksesnya Sampang menurunkan stunting, peningkatan IPM yang signifikan," katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mengaku siap untuk menjalankan seluruh amanah dan tugas yang diembankan pada dirinya. Yang terdekat yaitu siap untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada serentak mendatang.

"Kami siap untuk melaksanakan tugas yang diembankan pada kami. Dan tentu kami akan langsung tancap gas dan berkoordinasi dengan Pemkot untuk menyusun langkah-langkah strategis," tegasnya.

"Sedangkan untuk yang diamanahkan gubernur tentu kami siap. Sebenarnya kalau untuk di Kota

Probolinggo kami juga pernah melakukan pemberdayaan masyarakat di sana seperti dengan melakukan pemasangan PLTS," lanjut Kholis.

Sementara itu, Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto mengaku siap tancap gas untuk menyelesaikan tugas. Pentingnya kolaborasi maupun sinergisitas dengan pemerintah daerah hingga pusat, maka dipastikan segala program kerja bisa tercapai.

"Itu PR pemerintah daerah, sebagai orang pengalaman saya persiapkan nanti perencanaan yang baik dan penyusunan RPJMD ke depan," kata Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Deputy Kebijakan Pembangunan (DKP) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ini.

Sebelumnya, ada tiga nama usulan Pj bupati dari DPRD Sampang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui gubernur Jatim. Nama-nama itu di antaranya Rudi Arifiyanto yang diusung oleh 5 Fraksi DPRD yakni PPP, Partai Demokrat, Partai Golkar, gabungan Fraksi Amanat Sejahtera (PAN-PKS), dan Fraksi Perjuangan Rakyat (PDIP-Hanura).

Nama lainnya yaitu Sekretaris Daerah Setkab Sampang Yuliadi Setiawan, diusung oleh 6 fraksi yakni Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, Golkar, Fraksi Amanat Sejahtera (PAN-PKS), dan Fraksi Perjuangan Rakyat, serta Direktur POLTERA Sampang Laily Ulfiah, yang diusung oleh 3 fraksi, yakni Fraksi PKB, NasDem, dan Golkar.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri mantan Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi, Ketua DPRD Sampang Fadol, Forkopimda, Sekretaris DPRD Moh Anwar Abdullah, serta, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang Sudarmanto, Direktur RSUD dr Moh Zyn Sampang Agus Akhmadi, Direktur Utama PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Syaifulloh Asyik. (lut/dya)

Dan yang keempat adalah melaksanakan program aktual dari Presiden. Sesuai arahan presiden kebetulan yang dijadikan contoh adalah e-katalog dari Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ternyata e-katalog PBJ dari semua provinsi di Indonesia terbanyak adalah dari provinsi Jawa Timur,"

GUBERNUR JAWA TIMUR, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Jelang Pemilu dan Ramadan, Pemkot Malang Waspadaai Gejolak Harga Beras dan Daging Sapi

MALANG - Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 dan bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mewaspadaai gejolak harga beras dan daging sapi. Pasalnya dua komoditas tersebut ditambah komoditas jagung potensi menyumbang kenaikan angka inflasi.

Hal tersebut diungkap dalam High Level Meeting (HLM), pada Selasa (30/1/2024). Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, berbagai strategi akan dilakukan oleh Pemkot Malang, termasuk pengoptimalan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi di akhir tahun 2023, menjadi keyakinan bagi Pemkot Malang untuk dapat melakukan upaya serupa, di bulan Februari dan Maret 2024 nanti.

"Alhamdulillah akhir tahun 2023 kita bisa menekan (angka inflasi) sampai di bawah nasional dan provinsi. Dan itu semua berkat kerjasama yang baik antar seluruh elemen termasuk TPID Kota Malang. Jadi kemarin juga saat zoom meeting bersama Kemendagri RI, kita juga diingatkan bahwa Februari dan Maret serta beberapa bulan ke depan, itu harus tetap konsisten dan mewaspadaai komoditas yang dimungkinkan akan naik," ujar Pj Wali Kota Wahyu, ditemui usai menghadiri HLM tersebut, Selasa (30/1/2024).



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, dalam acara High Level Meeting, Selasa (30/1/2024). (Santi/Lenteratoday)

Wahyu menambahkan, strategi pengendalian inflasi harus tetap konsisten dilakukan. Mengingat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Februari, termasuk cuti bersama perayaan Imlek, peringatan Isra Mi'raj, hingga pesta demokrasi di 14 Februari mendatang. Menurutnya, penting untuk memperkuat antisipasi karena bulan Maret 2024 juga akan memasuki bulan puasa Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri di bulan April.

"Jadi ini penting untuk kita antisipasi, terlebih komoditi pangan, seperti cabai tahun kemarin itu kan ada kenaikan untuk harga cabai.

Kemudian sekarang yang perlu kita perhatikan terkait dengan beras dan untuk itu sudah kita koordinasi dengan Bulog Cabang Malang. Kemudian terkait daging sapi, jagung, itu kemarin jadi sorotan pemerintah provinsi pada saat koordinasi pengendalian inflasi dengan Kemendagri," tambah Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Pemkot Malang untuk menjaga ketersediaan dan harga stabil komoditas pangan. Terkait beras, menurutnya Pemkot akan menggelontorkan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) di dua

kecamatan, yaitu Klojen dan Blimbing.

Sementara untuk daging sapi, kerjasama akan dilakukan dengan Kabupaten Malang, untuk mengamankan pasokan daging sapi sebelum terjadi kenaikan harga. Adapun untuk jagung, menurutnya beberapa daerah di sekitar Kota Malang yang memiliki potensi panen jagung tinggi, akan diikutsertakan dalam kerjasama. Dengan melibatkan BUMD Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang untuk pembelian jagung.

"Kalau anggaran sudah kami siapkan, terkait dengan intervensi komoditi. Kemarin kami ada anggaran Rp 2 miliar. Karena untuk intervensi tidak hanya pada satu OPD, ada Dispanptan, Diskoperindag, ada bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (PISDA)," terang Wahyu.

Tak hanya itu, Wahyu juga menyebutkan bahwa Pemkot Malang akan berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga. "Kita memberikan subsidi karena SPHP ini kan dari Bulog kepada toko-toko, itu kan itu ada ongkosnya. Nah itu kami subsidi ongkosnya. Jadi kita menjual harganya yang tidak jauh dengan Bulog. Tetapi yang jelas kita akan gelontor dan pasti lebih murah daripada distributor," tukasnya. (Santi/Dya)

KPU Kabupaten Malang Klaim Uang Transport KPPS Sudah Dicairkan

MALANG - Beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Malang, mempertanyakan soal kejelasan dana transportasi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) yang diterimanya. KPU Kabupaten Malang sendiri memastikan, seluruh anggaran terkait bantuan transportasi (bantrans) telah dicairkan. Baik untuk bantrans bimtek maupun pelantikan.

Sebelumnya, salah satu anggota KPPS di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berinisial MR, mengungkapkan bahwa uang transport pelantikan sebesar Rp 50 ribu, telah diterima secara langsung usai pelantikan serentak yang dilakukan pada Kamis (25/1/2024) kemarin.

Namun, MR menyatakan, uang transport Bimtek dengan nominal Rp 50 ribu tidak diterimanya secara utuh pada Senin (29/1/2024) malam. Menurutnya, dari penjelasan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengklaim bahwa sebagian dari nominal tersebut dipotong untuk mengganti biaya pemeriksaan kesehatan, yang telah dilakukan saat tahap pendaftaran anggota KPPS.

"Uang transport bimtek terpotong lebih dari 50 persen dari nominal Rp 50 ribu. Katanya sebagai ganti untuk biaya pemeriksaan kesehatan. Nah kami tidak tahu kalau ternyata biaya pemeriksaan kesehatan, itu dipotong dari uang transport ini. Waktu itu memang kami tidak dipotong biaya. Selain itu juga dipotong lagi untuk penggantian biaya materai," ujar MR, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (30/1/2024).

Tak hanya MR, beberapa warganet melalui media sosial X, juga mempertanyakan kejelasan uang transportasi dari 2 kegiatan tersebut. "Serius nanya, pas pelantikan KPPS apa semua dapat duit, kah? Soalnya aku nggak, domisili Malang, Jatim," tulis akun @ialahkoentji.

Sedangkan akun lainnya, @durisakit, mempertanyakan "Hallo @KPU_ID @kpu_malang hari ini ada jadwal ke 2 bimtek KPPS di desa saya, dengan bimtek yang pertama tidak ada konsumsi dan snack yang tersedia. Begitu pun juga untuk uang saku. Di bimtek yang kedua dikasih uang saku Rp 50 ribu dan makan saja, untuk snack nya tidak ada. Apa segitu ya?" tulis akun tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, membenarkan adanya anggaran khusus untuk bantuan transportasi. Yaitu bantrans sebesar Rp 50 ribu untuk pelantikan KPPS dan Rp 50 ribu untuk Bimtek KPPS. Menurutnya, besaran tersebut sudah menjadi ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Malang.

"Pas tanggal pelantikan, itu memang banyak yang belum diterima di PPS, di tingkat desa. Tetapi akhirnya saat Bimtek kan bisa dibagikan. Jadi akan diserahkan di bimtek dimulai hari Senin (29/1/2024) kemarin. Jadi sudah dicairkan. Nanti bisa koordinasi dengan PPS nya saja. Kan mintanya ke PPS, tapi semua sudah kita cairkan," ujar Dika, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (30/1/2024).



Pelantikan anggota KPPS di Desa Wonoayu Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Kamis (25/1/2024). (Dok. Instagram ppkwajak)

Disinggung terkait laporan uang bantrans bimtek yang dipangkas sebagai pengganti biaya pemeriksaan kesehatan hingga materai. Dika menegaskan bahwa kedua aspek tersebut merupakan urusan yang berbeda, sehingga biaya pemeriksaan kesehatan tidak dapat dipotong dari alokasi dana bantrans. (Santi/Dya)

MAYANG LUCYANA

Jadi Sasaran Bully Gegara Posting Foto

MAYANG Lucyana adik mendiang Vanessa Angel kini makin aktif mengembangkan karier di dunia hiburan. Sayangnya, dia kerap mendapatkan hujatan yang menyinggung fisik hingga bakatnya di bidang musik secara terang-terangan.

Meski awalnya terkesan sudah kebal dengan hujatan, akhirnya Mayang buka suara. Dia mengungkapkan rasa galau dengan curhat di Instagram.

Melalui tangkapan layar yang dikumpulkan, diketahui jika Mayang disebut dekil hingga sok artis.

Tak jauh beda dengan Fuji, Mayang Lucyana mulai dikenal secara luas setelah sang kakak, Vanessa Angel meninggal dunia. Namun, keduanya mendapatkan perlakuan berbeda dari publik.

Ketika Fuji disambut dengan hangat hingga memiliki banyak fans, Mayang justru kerap kena hujat netizen.

Terkadang, hujatan itu juga dipicu oleh sikap Doddy Sudrajat sang ayah yang sempat disebut terlalu memaksa sang putri untuk jadi artis.

Mayang Lucyana akhirnya jadi sasaran bully netizen. Hal itu dikarenakan penampilan terbarunya yang diunggah di akun Instagram.

Dalam unggahan tersebut, adik kandung almarhum Vanessa Angel itu terlihat tampil stylish dengan one set denim dan skirt pendek berwarna biru.

"Jangan habiskan satu tahun lagi untuk melakukan hal yang sama," tulis Mayang Lucyana dalam keterangannya, awal bulan Januari 2024 lalu.

Namun, alih-alih mendapat pujian, Mayang justru dicemooh lantaran wajahnya tidak sama seperti ketika difoto oleh handphone orang lain.

Bila difoto melalui handphone sendiri, wajahnya terlihat begitu putih. Bahkan netizen menyebut aura Mayang seperti aura Magrib yang begitu gelap kemerahan.

Hujatan yang didapat Mayang bisa dibalang parah hingga menyinggung masalah fisik. Terbaru, Mayang mengumpulkan tangkapan layar komentar negatif netizen.

Melalui kiriman tersebut, diketahui bahwa Mayang disebut dekil hingga sok artis.

Menyikapi banyaknya hujatan, Mayang pun curhat di Instagram. Dia menulis sejumlah pengakuan di kolom caption. Mayang menyadari bahwa dirinya memang tidak sempurna.

"Iya. Aku memang gak sempurna.

Iya. Aku memang tidak cantik.

Iya. Aku bukan siapa-siapa.

Iya. Aku sering kepeleset kata dan masuk jurang.

Iya. Aku harus mengevaluasi diri." Caption Mayang Lucyana.

Selain mengungkapkan kegalauan karena hujatan, Mayang juga mengucapkan terima kasih. Selama ini, Mayang juga mendapatkan dukungan dalam berkariyer di dunia hiburan. Tak sedikit pula yang memuji paras cantik Mayang.

"Untuk kamu, yang masih terus mendoakan dan mendukung ku, terima kasih... terima kasih masih tetep memeluk, memberi kekuatan, dan percaya sama Mayang" tutup Mayang.

Profil dan Biodata

Mayang Lucyana Fitri lahir pada tahun 2003. Ibu kandung Vanessa Angel dan Mayang, Lucy Maywati meninggal tidak lama setelah melahirkan dirinya.

Kemudian pada 2016, sang ayah menikah kembali dengan Puput. Mayang diketahui dekat dengan Nachika, anak dari pernikahan Puput sebelumnya.

Mayang Lucyana Fitri adalah adik mendiang artis Vanessa Angel merupakan ipar almarhum Febri Andriansyah. Oleh karena itu Mayang dan Fuji merupakan saudara ipar.

Mayang diketahui kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan mengambil program studi Hubungan Internasional.

Banyak perubahan terjadi setelah Mayang terjun ke dunia Entertainment.

Ia sering melakukan perawatan bersama Doddy Sudrajat demi selalu tampil cantik.

Perjalanan Karir

Mayang Mayang mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah sang kakak, Vanessa Angel, meninggal dunia.

Ia sempat tampil mengcover lagu Seventeen berjudul Kemarin yang menuai banyak komentar karena masih dalam suasana berduka.

Selain itu Mayang juga terjun ke dunia tarik suara. Dirinya pernah berduet dengan Nicky Tirta dalam single lagu berjudul Di Hati.

Meski sempat dihujat, Mayang kini lebih fokus manggung off air demi profesinya sebagai penyanyi sekaligus musisi.

Di tahun 2022, dia pernah membintangi film berjudul Leak Kajeng Kliwon sebagai pemeran utama bersama Kevin Gutomo.

Rupanya Mayang mengaku sempat kebanjiran tawaran di dunia hiburan untuk jadi presenter. Saking banyak-nya, Doddy Sudrajat di-ketahui menolak tawaran untuk putri tersebut (berbagai sumber)



SESUDAH OPERASI



MENULIS DENGAN TANGAN

TINGKATKAN KONEKTIVITAS OTAK

PENEMUAN penelitian dalam Jurnal *Frontiers in Psychology* menemukan bahwa menulis dengan tangan dapat meningkatkan konektivitas otak dibandingkan mengetik di papan ketik atau keyboard

"Kami menunjukkan bahwa ketika menulis dengan tangan, pola konektivitas otak jauh lebih rumit dibandingkan ketika mengetik di keyboard. Konektivitas otak yang luas seperti itu diketahui sangat penting untuk pembentukan memori dan untuk mengkodekan informasi baru dan, oleh karena itu, bermanfaat untuk pembelajaran," kata Profesor Audrey van der Meer, salah satu penulis penelitian, yang ditulis laman *Medical Daily*, Jumat (26/1) waktu setempat.

Penelitian ini dilakukan kepada 36 mahasiswa yang berulang kali diminta untuk menulis atau mengetikkan kata yang muncul di layar.

Pada tahap menulis, mereka diberikan pena digital yang memungkinkan mereka menulis kursif langsung di layar sentuh. Saat mengetik, peserta diminta menggunakan satu jari untuk menekan tombol pada keyboard.

Para peneliti mencatat bahwa konektivitas wilayah otak yang berbeda meningkat ketika peserta menulis dengan tangan tetapi tidak ketika mereka mengetik di keyboard.

Dari sini peneliti mendesak anak-anak sejak usia dini harus terpapar pada tulisan tangan dalam setiap aktivitas di sekolah.

"Pola spatiotemporal dari informasi visual dan proprioseptif yang diperoleh melalui gerakan tangan yang dikontrol secara tepat saat menggunakan pena, berkontribusi besar terhadap pola konektivitas otak yang mendorong pembelajaran. Kami

mendesak agar anak-anak, sejak usia dini, harus terpapar pada tulisan tangan pada aktivitas di sekolah untuk membangun pola konektivitas saraf yang memberikan otak kondisi optimal untuk belajar," tulis para peneliti.

Meskipun temuan ini dibuat berdasarkan pengujian peserta saat menulis dengan pena digital, para peneliti mengatakan mereka mengharapkan hal yang sama ketika menggunakan pena asli di atas kertas.

Karena gerakan tangan saat menulis berada di balik peningkatan aktivitas otak, menulis di media cetak juga diharapkan memiliki manfaat serupa dengan menulis kursif.

Di sisi lain, gerakan sederhana menekan tombol dengan jari yang sama berulang kali saat mengetik ternyata kurang merangsang otak.

Hal ini juga menjelaskan mengapa anak-anak yang telah belajar menulis dan membaca di tablet, dapat mengalami kesulitan membedakan huruf-huruf yang merupakan bayangan cermin satu sama lain, seperti 'b' dan 'd'.

"Mereka benar-benar belum merasakan dengan tubuh mereka bagaimana rasanya menghasilkan surat-surat itu," kata van der Meer.

Mengutip halodoc, tidak hanya tubuh saja, otak juga perlu dilatih supaya tetap on dan kritis dalam berpikir.

Melatih otak dapat dilakukan dengan senam otak. Senam otak menggabungkan gerakan fisik, pernapasan, dan latihan kognitif yang dirancang untuk melibatkan

berbagai area otak.

Prinsip di balik senam otak adalah bahwa gerakan fisik tertentu dapat memperkuat konektivitas antara otak kiri dan otak kanan, yang dapat meningkatkan kemampuan otak untuk mengatasi tantangan kognitif.

Dengan merangsang berbagai bagian otak melalui gerakan dan latihan kognitif, senam otak diharapkan dapat membantu memperbaiki keseimbangan otak dan mengurangi stres.

Kita tahu bahwa berbagai jenis olahraga memengaruhi fungsi otak yang berbeda. Hampir semua olahraga memberikan beberapa manfaat, bahkan hanya membantu mengurangi stres, yang berdampak negatif pada otak saat kronis.

Konsistensi dan keteraturan juga merupakan faktor utama dalam berolahraga untuk otak yang tajam dan sehat. Satu studi terkenal tentang olahraga dan kesehatan otak mengamati dampak kesehatan otak dari beberapa modalitas olahraga yang berbeda dalam jangka waktu yang berbeda.

Ditemukan bukti otak mendapat manfaat berlainan dari jenis olahraga yang berbeda, dan bahwa otak mendapat manfaat yang lebih banyak dan berbeda dari berolahraga dari waktu ke waktu terlepas dari jenis olahraganya.

Para peneliti dan dokter kini menggali lebih dalam untuk mencari tahu persis berapa banyak olahraga yang kita butuhkan dan jenis olahraga apa yang ideal untuk kesehatan otak yang optimal. (Antara-berbagai sumber)



PERFORMA BERMAIN GIM DI SAMSUNG GALAXY A15

BELUM lama ini Samsung Indonesia kembali menghadirkan smartphone entry-level dengan memboyong Samsung Galaxy A15 ke Tanah Air.

Tersedia varian versi 4G dan 5G, juga dua pilihan memori internal, harga smartphone ini dimulai di bawah Rp3 juta, yakni Rp2,89 juta untuk varian 4G 128GB, hingga varian tertingginya Samsung Galaxy A15 5G 256GB seharga Rp3,59 juta.

Keduanya dibekali RAM 8GB, sangat besar di kelasnya dan tentu membuat performanya semakin kencang. Namun, bagaimana performanya dalam bermain gim?

Gim pertama yang kami coba adalah Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), salah satu gim moba yang paling banyak digandrungi pemain Indonesia.

Tidak banyak ekspektasi di awal perihal performa A15 di dalam gim, mengingat ini adalah smartphone entry-level. Namun, cukup mengejutkan, Samsung A15 menampilkan grafik yang begitu jernih dan mulus.

Tampaknya ini adalah jasa dari layar Super AMOLED resolusi FHD+ (Full HD Plus) dengan refresh rate 90Hz.

Bahkan, ponsel ini dapat menjalankan gim MLBB dengan pengaturan grafis rata kanan, yakni frame rate pengaturan Super, dan Grafis kualitas Ultra. Cukup di luar ekspektasi.

Angka-angka ini juga bukan sekadar gimik, pasalnya, selama lebih dari satu jam bermain di mode Ranked, tidak ada lag atau drop rate yang berarti, bahkan hampir tidak pernah terjadi.

Berhubung dibekali RAM 8GB dan ditengahi chip octa core, bermain gim

MLBB di Samsung Galaxy A15 cukup menyenangkan tanpa "patah-patah", tidak akan membuat kesal karena "terhenti" di tengah-tengah permainan.

Gim kedua yang kami coba adalah gim first person shooter (FPS) paling mainstream yakni PUBG Mobile.

Sedikit kecil hati karena di gim ini Samsung Galaxy A15 hanya mampu menyetel kualitas grafis hingga HD, belum mencapai HDR, Ultra HDR, maupun Extreme HDR.

Namun, hal ini cukup terobati dengan penyetelan frame rate tertinggi yakni High, pengaturan yang paling dibutuhkan pada gim FPS.

Meski hanya sampai pada HD, kualitas gambar HD juga tidak bisa dibilang buruk. Grafis yang ditampilkan tetap jelas dan jernih, meski tidak semulus pengaturan di atasnya.

Permainan juga berjalan dengan mulus tanpa gangguan drop rate yang berarti, meski sesekali terjadi. Kami menyarankan untuk menggunakan headset ataupun headphone untuk memainkan gim FPS di ponsel ini, mengingat ia hanya dibekali satu buah speaker di bawah, sehingga sulit mendeteksi jejak musuh dari segala sisi tanpa perangkat suara tambahan.

Hal yang menakjubkan dari Samsung Galaxy A15 adalah baterainya, yang mencapai 5.000 mAh.

Bermain gim hingga berjam-jam baterai masih tersisa banyak, sehingga tidak perlu mengisi daya sembari bermain gim, kebiasaan buruk yang sering dilakukan para gamers.

Bermain gim performa tinggi hingga tiga jam dicampur menonton video di YouTube juga tidak membuat baterai terasa panas sama sekali, ini tentu perlu diacungi jempol.

Kesimpulannya, Samsung Galaxy A15 sangat mumpuni bagi pecinta gim yang hendak memboyong smartphone entry-level.

Bila gawai ini bekerja dengan baik dalam menjalankan gim berat, ia juga mampu menjalankan tugas-tugas keseharian dan multi-tasking seperti berselancar di media sosial dan bertukar pesan.

Galaxy A15 dan Galaxy A15 5G, keduanya menawarkan keunggulan berupa konektivitas NFC dan layar Super AMOLED yang jernih.

Diperkuat dengan fitur "Vision Booster", perangkat ini memungkinkan pengguna tetap

nyaman melihat layar ponsel meski berada di bawah pencahayaan matahari yang kuat.

Spesifikasi kamera yang disematkan pada Galaxy A15 dan Galaxy A15 5G juga sama, dengan formasi triple camera hadir dengan lensa utama 50MP, lensa ultra-wide 5MP, dan macro lens 2MP. Sementara untuk kamera depannya tampil dengan ukuran 13 MP.

Daya yang besar juga disematkan pada seri Galaxy A15, dengan baterai berukuran 5.000mAh dan pengisian daya cepat 25W membuat pengguna tak akan was-was kehabisan daya saat beraktivitas sehari-hari (Antara)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

BIJAK DALAM MENGGUNAKAN LENSA KONTAK

DI era modern ini, penggunaan lensa kontak telah menjadi pilihan yang sangat digemari di kalangan masyarakat sebagai solusi praktis untuk masalah mata rabun dan minus.

Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan lensa kontak di seluruh dunia yang mencapai 6 persen setiap tahunnya.

Meskipun begitu, penggunaan lensa kontak tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengetahuan dan perilaku yang baik menjadi kunci utama untuk mendukung penggunaan lensa kontak dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tingkat ketidakpatuhan dalam penggunaan lensa kontak berkisar antara 50 hingga 91 persen.

Tingkat ketidakpatuhan seperti ini meningkatkan risiko terjadinya berbagai komplikasi, mulai dari yang ringan hingga yang dapat berujung pada kehilangan penglihatan.

Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan lensa kontak dan menerapkan perilaku yang benar sangat penting.

Pengetahuan dan perilaku yang baik bukan hanya kunci untuk mendapatkan kenyamanan menggunakan lensa kontak, tetapi juga merupakan langkah preventif dalam menghindari komplikasi yang mungkin terjadi.

Salah satu aspek penting adalah pemilihan jenis lensa kontak yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mata kita.

Lensa kontak adalah lempengan plastik tipis transparan yang digunakan pada kedua mata untuk meningkatkan fungsi penglihatan penderita gangguan penglihatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan lensa kontak juga dikembangkan untuk kepentingan kosmetik.

Lensa kontak dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu lensa kontak keras dan lensa kontak lunak.

Lensa kontak keras lebih bermanfaat bagi penderita

astigmatisme (pengguna lensa kacamata dengan silinder) dan keratoconus (penonjolan kornea seperti kerucut) karena memberikan penglihatan yang lebih jelas pada kelengkungan kornea yang tidak rata.

Sementara lensa kontak lunak bersifat lebih nyaman dan memiliki variasi yang lebih banyak dibandingkan lensa kontak keras. Lensa kontak lunak terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan waktu penggunaannya, yaitu lensa kontak harian, extended (bulanan, per-3 bulan, per-6 bulan), dan lensa kontak dekoratif (kosmetik).

Selain jenis lunak dan keras, di Indonesia, terdapat beberapa jenis lensa kontak yang jarang diketahui oleh masyarakat, yaitu lensa kontak hybrid dan lensa kontak skleral.

Lensa kontak harus nyaman digunakan dan mampu mengantarkan oksigen dari lingkungan ke permukaan kornea.

Pahami sebelum pakai

Sebelum menggunakan lensa kontak, seseorang perlu memahami terlebih dahulu keuntungan dan efek samping yang didapatkan dengan penggunaan lensa kontak.

Secara umum, kondisi yang tidak disarankan untuk penggunaan lensa kontak adalah gangguan yang terjadi pada mata, seperti peradangan, penyakit gangguan pada lapisan mata, kelopak mata, mata kering, alergi, pterigium (selaput pada bagian putih permukaan bola mata), dan glaucoma (tekanan bola mata yang tinggi) yang tidak terkontrol.

Efek samping

Efek samping yang paling sering terjadi adalah yang berhubungan dengan kebersihan penggunaan lensa kontak, yaitu infeksi pada kornea (keratitis).

Efek samping lain yang dapat terjadi adalah kerusakan dari lapisan

kornea, iritasi pada mata, reaksi alergi dan mata kering.

Efek samping tersebut harus diobati oleh dokter spesialis mata secara tepat, sehingga tidak berkembang menjadi penyakit yang berat dan berujung pada kebutaan.

Berdasarkan American Optometric Association, penggunaan lensa kontak secara umum harus atas saran dari dokter spesialis mata untuk rekomendasi lama penggunaan lensa kontak dan jadwal penggantian lensa kontak.

Lensa kontak hendaknya tidak digunakan semalaman, kecuali disarankan oleh dokter spesialis mata, karena akan meningkatkan risiko efek samping.

Terakhir adalah kenali tanda bahaya. Jika

mata Anda terlihat berbeda, seperti mata merah, ada warna putih di tengah mata, tidak dapat melihat dengan baik atau buram, dan mata terasa perih, nyeri, berair, dan silau, maka konsultasikan kondisi Anda ke dokter spesialis mata.

Sambil menunggu waktu pertemuan dengan dokter spesialis mata Anda, maka dapat dilakukan tindakan pertama, yakni meneteskan air mata buatan secara sering (per satu sampai 3 jam) dan kompres dingin (Antara)



Wajah Buram ... (dari Hal 1)

SKOR Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index Indonesia 2023 stagnan. Posisinya di antara negara-negara Asean berada di bawah Timor Leste.

Pada hari ini, Selasa (30/1/2024), Transparency International Indonesia (TII) merilis skor IPK Indonesia di 2023 sebesar 34/100. Skor tersebut sama dengan tahun sebelumnya yakni 34. Posisi Indonesia secara global dari 180 negara yakni di peringkat 115.

"Berarti kita ada pada kondisi stagnan secara skor. Rangkingsnya merosot 5 poin dari 110 menjadi 115," kata Deputy Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Sementara itu, posisi Indonesia berada di peringkat 6 di antara negara-negara Asean. Peringkat Indonesia berada di bawah Timor Leste yang menduduki peringkat ke 3. Skor CPI Timor Leste naik dari 42 pada 2022 menjadi 43 pada tahun ini. Namun, TII mencatat bahwa perbandingan antara IPK RI dan Timor Leste sebenarnya tidak berimbang karena perbedaan jumlah indikator penilaian IPK.

"Di Indonesia ada 8 indikator dan Timor Leste hanya 4. Jadi agak tidak fair membandingkan Indonesia dan Timor Leste skornya," lanjut Wawan.

IPK atau CPI di Indonesia dibentuk dari delapan sumber data. Empat sumber data tercatat mengalami stagnasi yakni Global Insight, World Justice Project-Rule of Law Index, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit. Lalu, tiga sumber data mengalami kenaikan yaitu Bertelsmann Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy Project.

Selanjutnya, Wawan membeberkan skor IPK Indonesia tertinggi sepanjang era reformasi pada 2019, sebesar 40. Tapi sayangnya, prestasi ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian terjun bebas ke posisi 37. Naik satu level menjadi 38 pada 2021. Kemudian anjlok lagi ke posisi 34 pada 2022.

Wawan mengatakan, skor IPK Indonesia pada 2023 di angka 34, berdampak kepada longsoalnya peringkat atau ranking. Dari 180 negara, Indonesia berada di peringkat 115. Atau turun 5 peringkat ketimbang 2022. "Dengan capaian ini, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand," paparnya.

Untuk kawasan ASEAN, kata Danang, Singapura menjadi negara yang paling sukses memerangi korupsi pada 2023, skornya 83. Disusul Malaysia dengan skor 50, Timor Leste 43, Vietnam skor 41, dan Thailand skor 35.

"Malaysia naik jadi 50 dari 47. Timor Leste naik dari 42 ke 43 karena hanya punya 4 indikator, sedangkan Indonesia 8 indikator," jelasnya.

Dari 8 indikator yang disurvei, ada satu indikator atau sumber data di Indonesia yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yakni, PRS International Country Risk Side merosot 3 poin dari 35 menjadi 32. Jika ditarik lebih jauh maka terjadi

penurunan 16 poin dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, empat sumber data lainnya, mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings dengan skor 47, World Justice Project - Rule of Law Index skor 24, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit skor 29.

Sedangkan, tiga sumber data sisanya, mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Transformation Index (+3) dari 33 menjadi 37, IMD World Competitiveness Yearbook (+1) dari 39 menjadi 40, dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1) dari 24 menjadi 25.

Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko, demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur dengan cepat. Hal itu tercermin dari rendahnya juga pemberantasan korupsi. "Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak akan diraih," kata Danang, Selasa (30/1/2024).

Faktor yang Melemahkan

Terpisah, anggota Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mentakan, bila ditarik saat kali pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden pada 2014 silam, skor IPK kala itu sama dengan kondisi hari ini. Kondisi tersebut menunjukkan sepanjang 9 tahun pemerintahan Joko Widodo tidak memiliki kontribusi berarti dalam agenda pemberantasan korupsi. Malahan cenderung membawa kemunduran yang signifikan.

Merujuk situasi stagnansi pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya ICW memetakan 7 persoalan yang ditengarai menjadi faktor melemahnya IPK. Pertama, Presiden Jokowi dinilai lebih sibuk 'cawe-cawe' dalam urusan politik, ketimbang melakukan pembenahan hukum. Padahal situasi Indonesia kini memiliki setumpuk tunggakan legislasi yang diyakini dapat menyokong agenda pemberantasan korupsi.

Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, hingga Revisi UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyesuaikan norma konvensi PBB Melawan Korupsi. Alih-alih dikerjakan, Presiden malah larut dengan nuansa politik dan melupakan janji politik penguatan pemberantasan korupsinya.

Kedua, Presiden lepas tanggung jawab terhadap situasi yang amat mengkhawatirkan di KPK. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar. Sebab Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah meletakkan Presiden sebagai atasan administratif lembaga antirasuah itu. Oleh karena itu buruknya tata kelola di kelembagaan

KPK, presiden mestinya mengambil tindakan cepat.

"Akan tetapi, hal tersebut juga tidak dikerjakan. Akibatnya, kinerja KPK menurun, bahkan kepercayaan masyarakat merosot tajam belakangan waktu terakhir," katanya.

Ketiga, proyek legislasi yang dihasilkan oleh Presiden bersama dengan DPR telah berhasil mendegradasi pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Misalnya, UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan. Pasalnya substansi UU 22/2022 melonggarkan aturan pemberian remisi bagi terpidana korupsi.

Akibatnya, menurut Kurnia para terpidana korupsi dapat lebih cepat menjalani masa pemidanaan. Seperti Pinangki Sirna Malasari, Wahyu Setiawan, atau Nur Alam. Kemudian UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan hukuman penjaranya justru lebih ringan ketimbang UU Pemberantasan Tipikor.

Keempat, komitmen pemberantasan korupsi dari aparat penegak hukum semakin rendah. Sebut saja KPK, di mana tahun 2023 menjadi periode terburuk sepanjang sejarah. Maklum, Ketua KPK Firlil Bahuri, ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Polda Metro Jaya. Belum lagi ditambah problematika internal, baik dugaan pelanggaran kode etik maupun korupsi berjamaah puluhan pegawai KPK di rumah tahanannya sendiri.

Selain itu, kepolisian dan kejaksaan juga memperlihatkan gejala yang hampir serupa. Maklum, beberapa bulan lalu dua lembaga penegak hukum itu kompak menunda proses hukum yang melibatkan peserta pemilu karena khawatir dipolitisasi. "Argumentasi ini jelas menunjukkan sikap yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Kelima, lembaga kekuasaan kehakiman masih belum berorientasi pada pemberian efek jera saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi. Menurut ICW, kata Kurnia, sepanjang tahun 2023, ada beberapa putusan janggal yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung (MA). Misalnya, mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh, divonis bebas pada tingkat kasasi. Selain itu, menurut Kurnia ada pengusaha kelapa sawit, Surya Darmadi, yang kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 39,75 triliun dihapus oleh MA.

"Sebenarnya, rendahnya vonis pengadilan ini bukan hal mengejutkan lagi. Merujuk pada data ICW, rata-rata hukuman terdakwa korupsi sepanjang tahun 2022 hanya 3 tahun 4 bulan penjara," katanya.

Keenam, di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi, praktik lancung berupa konflik kepentingan pejabat publik bukan hanya ditolerir, tapi seakan dianjurkan. Teranyar, Presiden malah menegaskan dirinya dan menteri boleh berkampanye dan berpihak dalam kontestasi elektoral. Kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jauh berbeda.

Ketujuh, gelombang korupsi di

sektor politik kian masif belakangan terakhir. Sebagai contoh, di lingkaran terdekat kabinet Jokowi saja, sudah ada 6 menteri dan 1 wakil menteri tersandung kasus korupsi. Yakni Juliari P Batubara (Menteri Sosial), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Idrus Marham (Menteri Sosial), Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Eddy OS Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM).

"Jumlah ini terbilang paling banyak jika dibandingkan dengan rezim pemerintahan sebelumnya," pungkasnya.

Sementara, Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Januari 2024 mengatakan, "Selain rangkaian kontroversi konflik kepentingan, nilai IPK hari ini merupakan nilai akhir pada rezim Jokowi. Artinya selama 10 tahun, terbukti strategi dan agenda Jokowi tidak berhasil bahkan hanya untuk menyamakan peringkat sesuai nilai pada saat jabatannya dimulai," katanya.

Praswad mengatakan tahun ini merupakan upaya terakhir Presiden memperbaiki skor IPK Indonesia. Penurunan peringkat tersebut dinilai membuktikan bahwa Jokowi gagal dalam sepuluh tahun masa kerjanya. (wid,rls,ist,ant/dya)

FAKTOR YANG MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA

1. Presiden Jokowi disorot lebih aktif politik daripada membenahi hukum. Padahal, masih banyak undang-undang tertunda, seperti RUU Perampasan Aset, Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Pemberantasan Korupsi sesuai norma PBB.
2. Presiden dinilai melepaskan tanggung jawab terhadap kekhawatiran di KPK. Meski Pasal 3 UU No.19/2019 menempatkan Presiden sebagai atasan administratif, tata kelola KPK yang buruk memerlukan tindakan cepat dari presiden.
3. Proyek legislasi Presiden dan DPR merendahkan pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Contohnya, UU No.22/2022 tentang Pemyarakatan melemahkan aturan remisi untuk terpidana korupsi.
4. Komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi menurun, khususnya selama tahun 2023, yang menjadi periode terburuk bagi KPK. Ketua KPK, Firlil Bahuri, menjadi tersangka korupsi oleh Polda Metro Jaya. Masalah internal seperti dugaan pelanggaran etika dan korupsi melibatkan puluhan pegawai KPK di dalam tahanan mereka sendiri.
5. Lembaga kekuasaan kehakiman masih belum berorientasi pada pemberian efek jera saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi.
6. Praktik konflik kepentingan pejabat publik tak hanya ditolerir, tapi seakan dianjurkan, terutama dengan pernyataan terbaru Presiden yang membolehkan kampanye dan dukungan elektoral dari dirinya dan menteri. Situasi serupa terjadi di BUMN.
7. Gelombang korupsi di sektor politik semakin masif, terutama di lingkaran terdekat kabinet Jokowi. Hingga saat ini, sudah 6 menteri dan 1 wakil menteri, seperti Juliari P Batubara, Edhy Prabowo, Imam Nahrawi, Idrus Marham, Johnny G Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Eddy OS Hiariej, tersandung kasus korupsi.

Direstui Megawati, Pengunduran Diri Mahfud Tunggu Pertemuan dengan Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah merestui Mahfud MD mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Di sisi lain, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 03 itupun telah meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menjadwalkan pertemuan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mega juga sudah bertemu Mahfud pada Senin (29/1/2024) atau beberapa saat sebelum pertemuan Mahfud dengan Mensesneg Pratikno. "Sudah lama diberikan restu," ucap Hasto di sekretariat Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Selasa (30/1/2024).

Hasto mengatakan rencana Mahfud mundur dari kabinet telah dibahas bersama capres Ganjar Pranowo serta para ketua umum partai pengusung seperti PDIP, PPP, Hanura hingga Perindo. Hasto menilai rencana Mahfud untuk mundur telah memasuki waktu yang tepat. Terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ini suatu momentum yang sangat baik. Terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada gerakan unfollow sosial media dari presiden Jokowi. Itu yang kemudian kami cermati," katanya.

Di sisi lain, Hasto juga khawatir banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. "Ada Prof Mahfud aja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud. Nah mundur tidaknya sudah disepelekan bersama hanya masalah menegakkan hukum untuk rakyat ini lah yg dikebut oleh prof mahfud untuk segera diselesaikan," kata dia.

Mahfud yang kini maju menjadi calon wakil presiden mengaku tengah menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Dia juga telah meminta waktu untuk bertemu Presiden kepada Mensesneg Pratikno.

"Saya sudah menemui Mensesneg Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan saya ketemu Bapak Presiden (Jokowi)," ucap Mahfud saat ditanya awak media terkait dengan rencana mundur dari jabatannya, Selasa (30/1/2024). Hal itu dikatakan saat ia menghadiri sarasehan dengan para kiai di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menurut Mahfud, pada 2019 lalu, dirinya diangkat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri dengan penuh kehormatan. "(Saya) juga harus memberi tahu (rencana mundur) dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saya. Itu segi etikanya, ya. Saya sudah (laksanakan)," ucapnya.



Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dikerumuni masa saat Kampanye Akbar tatap muka. (dok)

Cawapres dari Ganjar Pranowo ini ingin menjalankan nasihat orang Jawa, yakni ojo tinggal glanggang, colong playu atau meninggalkan posisi untuk lari dari tanggung jawab. "(Saya tidak ingin) pergi begitu saja, tidak menghadap (presiden) dulu dengan penuh kehormatan," ucap Mahfud.

Terlepas dari rencana pengunduran dirinya, Mahfud mengajak kalangan pesantren untuk tetap ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, sejak negeri ini terbentuk, pesantren telah berperan besar dalam menjaga pluralisme yang menghargai keberagaman warga.

"Jangan musuhi orang karena perbedaan agamanya. Jangan musuhi orang karena perbedaan sukunya, jangan bermusuhan karena berbeda rasnya. Tapi, musuhi orang karena kejahatannya. Kalau orang jahat, musuhi sama-sama. Orang suka korupsi, musuhi, sikat sama-sama. Enggak pandang bulu," kata Mahfud.

KH Yasyif Maemun, pengasuh Pondok Pesantren Assalafie di Babakan Ciwaringin, menilai, keilmuan dan pengalaman Mahfud MD tidak diragukan lagi karena pernah berkecimpung di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ia pun berharap, Mahfud bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

KH Maemun mengimbau kepada masyarakat agar mencermati para kandidat dan tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa. "Memilih pemimpin itu taruhannya keselamatan negara," ucapnya.

Yusril, Tito dan Hadi Masuk Bursa

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini, Jokowi bakal menunjuk tokoh dari kalangan profesional jika Mahfud benar akan mundur. Sebab, Mahfud berlatar belakang non parpol.

"Kalau Mahfud mundur dari profesional kemungkinan paling besar ya dari kalangan profesional lagi," kata Ujang. Menurutnya, partai koalisi akan

ribut bila pengganti Mahfud berasal dari partai politik. Hal itu pun makin memperkeruh suasana partai koalisi Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berpeluang menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan jika seandainya Mahfud MD mengundurkan diri. Yusril secara pengalamannya dinilai mampu mengatasi persoalan Polhukam.

"Situasi saat ini, ada nama Yusril Ihza Mahendra, dia punya peluang karena ada dalam koalisi Prabowo-Gibran, juga dari sisi kapasitas dianggap mampu," kata Dedi. Selain itu, bisa saja terjadi rotasi di mana Presiden Jokowi menunjuk Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggantikan Mahfud MD.

Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memandang positif rencana pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut dia, Mahfud memberikan contoh bahwa pejabat publik yang maju pilpres sebaiknya mundur untuk hindari abuse of power dan conflict of interest.

Tak berhenti di situ, Adi menilai dengan adanya pengunduran diri Mahfud ini, pejabat publik lain yang ikutan cawe-cawe urusan pilpres sebaiknya mundur juga atau minimal cuti kampanye Pemilu 2024. "Itu jauh elegan dan terhormat," ujar Adi.

Selain itu, Adi berujar mundurnya Mahfud bisa menimbulkan kesan ketidakpercayaan Mahfud kepada netralitas presiden yang memihak pasangan Prabowo-Gibran. "Kalau betul Mahfud mundur, suasana tak nyaman internal menteri makin menebal karena beda urusan politik," kata Adi.

Sementara, Pengamat Politik UPI Karim Suryadi menilai rencana cawapres Mahfud MD mundur dari

kabinet bisa meringankan langkahnya di Pilpres 2024. Karim mengatakan rencana Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi bisa meringankan perannya dalam kampanye, meski keputusan tersebut dinilai terlambat.

"Menurut saya terlambat untuk mundur tapi penting dilakukan agar apa yang dikerjakan ringan. Beda dengan menteri lain yang juga nyapres juga mengambil langkah ini akan lebih ringan," katanya. (wid,rls,ist/dya)

BURSA MENKOPOLHUKAM BILA MAHFUD MD MUNDUR



Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004

- Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007



Hadi Tjahjanto

- Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (2011-2013)

- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (2013-2015)

- Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh (2015)

- Sekretariat Militer Presiden (2015-2016)

- Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (2016-2017)

- Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2017-2018)

- Panglima Tentara Nasional Indonesia (2017-2021)

- Menteri ATR/BPN (sampai sekarang)



Tito Karnavian

- Kapolda Papua (21 Sept 2012-16 Juli 2014)

- Asrena Polri (16 Juli 2014-12 Juni 2015)

- Kapolda Metro Jaya (12 Juni 2015-16 Maret 2016)

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (16 Maret 2016-13 Juli 2016)

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (13 Juli 2016-22 Oktober 2019)

- Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019-Sekarang)

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ad interim (4 Juli 2022-15 Juli 2022)